

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KEGIATAN PENAMBANGAN INTAN DI KECAMATAN CEMPAKA, BANJARBARU

Decky Kuncoro¹, Ahmad Jamaluddin Islami², Beni Akhmad³

^{1,3} Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,
Indonesia

² Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

punyadeckykuncoro@gmail.com

Abstrak

Penambangan intan di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan penambangan intan di daerah tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pekerja tambang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sudah diterapkan, tantangan utama berupa penegakan hukum yang lemah, kurangnya partisipasi masyarakat, dan minimnya sumber daya untuk pengawasan menjadi hambatan besar dalam implementasinya. Dampak lingkungan yang ditimbulkan termasuk kerusakan tanah, penurunan kualitas air, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Lingkungan, Penambangan Intan

Abstract

Diamond mining in Cempaka District, Banjarbaru, significantly contributes to the local economy but also causes adverse environmental impacts. This study aims to assess the implementation of environmental management policies in diamond mining activities in the area and identify the factors hindering their implementation. The research uses a qualitative approach with in-depth interviews of key stakeholders, including local government, community members, and miners. The findings reveal that although environmental management policies have been implemented, key challenges such as weak law enforcement, lack of community participation, and limited resources for supervision hinder their effectiveness. Environmental impacts include land degradation, reduced water quality, and threats to biodiversity. The study recommends improving supervision, enforcing stricter laws, and raising community awareness and involvement in environmental management processes.

Keywords: Policy Implementation, Environmental Management, Diamond Mining

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk dalam sektor pertambangan. Salah satu bahan tambang yang banyak ditemukan di Indonesia adalah intan, yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di Kalimantan Selatan. Penambangan intan di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal. Meskipun demikian, aktivitas penambangan ini tidak terlepas dari dampak negatif yang cukup besar terhadap lingkungan hidup dan masyarakat setempat (Nikmah & Yamani, 2022).

Penambangan intan di Cempaka, Banjarbaru, memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur bentang alam, kualitas tanah, dan keberagaman hayati. Pencemaran air, erosi, dan degradasi tanah menjadi masalah utama yang muncul sebagai akibat dari kegiatan penambangan ini. Penambangan yang tidak terkelola dengan baik dapat mengakibatkan hilangnya vegetasi penutup tanah, perubahan aliran air, serta ancaman terhadap ekosistem yang ada (Fitriyanti, 2016). Dampak yang muncul akibat kegiatan penambangan intan tersebut disebabkan karena pemanfaatan teknologi sederhana yang memiliki tingkat efisiensi rendah dan tidak dilengkapi dengan sistem penanganan limbah yang memadai sehingga penggunaan bahan-bahan kimia yang digunakan tidak dalam kontrol yang tepat dan sesuai dengan standar (Prasetyo, Baderan, Hamidun, 2025). Selain itu, dampak sosial dari penambangan juga tidak dapat diabaikan, di antaranya adalah konflik antara masyarakat dengan pengusaha tambang serta penurunan kualitas kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan, termasuk penambangan intan. Salah satu kebijakan yang relevan adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Perda Kalimantan Selatan, 2017).

Meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum yang lemah, minimnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan sumber daya untuk pengawasan menjadi faktor penghambat utama dalam keberhasilan kebijakan ini (Jimmy & Merang, 2020). Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Cempaka Banjarbaru diterapkan dan apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitasnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas dampak lingkungan dari kegiatan penambangan, khususnya penambangan intan di Cempaka, Banjarbaru. Penelitian oleh Syarifah Anisa Barokah (2022) mengungkapkan bahwa penambangan intan di Cempaka memberikan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan, meskipun memiliki keuntungan ekonomi. Kerusakan lingkungan seperti tanah yang gundul, kualitas air yang menurun, dan kerusakan ekosistem menjadi masalah yang tidak dapat dihindari. Selain itu, penelitian oleh Lely Adriani Nasution (2020) juga menunjukkan bahwa penambangan rakyat intan di Cempaka telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang mencakup aspek abiotik, biotik, dan sosial.

Dari dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan intan tersebut, maka menjadi hal yang menarik untuk dapat melihat proses implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan di wilayah penambangan intan di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Grindle (2006) dalam teorinya tentang implementasi kebijakan menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya tergantung pada perumusan kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada faktor-faktor seperti kekuasaan aktor, kepentingan yang terlibat, serta kapasitas lembaga yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Grindle menekankan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang melibatkan konflik dan kompromi antara berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam konteks penambangan intan di Cempaka, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, pengusaha tambang, serta pemerintah.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012), indikator implementasi kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:

1. Kebijakanaksanaan penataan. Kebijakanaksanaan ini berkaitan dengan serangkaian tindakan, keputusan, dan strategi yang diambil oleh para pembuat dan pelaksana kebijakan untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan diterapkan secara efektif, dan berkelanjutan.
2. Kebijakanaksanaan dalam pemanfaatan. Tindakan yang berkaitan dengan penerapan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai keseimbangan pemanfaatan antara kebijakan dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakanaksanaan dalam pengembangan. Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pengembangan manusia dan perkembangan yang terjadi di lingkungan.
4. Kebijakanaksanaan dalam pemeliharaan. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip dengan bijak dan berwawasan lingkungan dengan lebih maju. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang memperhatikan keberlanjutan, keseimbangan serta kesejahteraan yang menjadi ruang lingkup kebijakan.

5. Kebijakan dalam pemulihan. Tindakan-tindakan yang dilakukan dengan bijak dan cermat dalam upaya memulihkan atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan yang sebelumnya berjalan kurang efektif atau yang pada akhirnya menimbulkan masalah.
6. Kebijakan dalam pengawasan. Tindakan yang didasarkan pada pertimbangan untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa kegiatan pengelolaan lingkungan telah dijalankan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
7. Kebijakan dalam pengendalian lingkungan hidup. Tindakan yang dilakukan secara bijaksana dalam pengendalian lingkungan hidup khususnya pada penggunaan ilmu pengetahuan, peningkatan pemahaman, serta melakukan penilaian yang bijak dalam membuat sebuah keputusan yang akan berdampak pada lingkungan.

Implementasi kebijakan yang berhasil memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Cempaka. Selain itu, penelitian oleh Widodo et al. (2019) menyatakan bahwa penegakan hukum yang lemah dan kurangnya pengawasan dari pemerintah menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan yang tidak maksimal menyebabkan penambangan ilegal terus berlangsung, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan, implementasinya sering kali tidak sesuai harapan karena adanya hambatan struktural dan kelembagaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan penambangan intan di Cempaka, Banjarbaru, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat terkait dalam upaya perbaikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan penambangan intan di daerah tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan penambangan intan di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru. Penelitian deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis keadaan yang ada tanpa melakukan perubahan (berlatar natural) terhadap indikator-indikator yang diteliti (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah untuk menggali bagaimana

kebijakan tersebut diimplementasikan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapannya di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan informan yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan penambangan intan. Informan yang diwawancarai antara lain pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, kepala Kecamatan Cempaka, masyarakat sekitar, dan pekerja tambang. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait seperti peraturan daerah, laporan kebijakan, dan studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara semi-terstruktur, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang mendalam dari pemangku kepentingan terkait kebijakan yang diterapkan. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan intan terhadap lingkungan. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari arsip dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan penambangan intan.

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu penyaringan informasi yang relevan, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk naratif atau tabel untuk memudahkan pemahaman, dan akhirnya penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan diverifikasi untuk memastikan hasil yang valid. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang jelas mengenai efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada penambangan intan di Cempaka, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.

C. Hasil dan pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan penambangan intan di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Indikator-indikator yang dijadikan acuan untuk dapat mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan penambangan intan di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru adalah indikator yang dikemukakan oleh Grindle (1980) yang dikutip melalui Nugroho (2023). Adapun indikator-indikator tersebut terdiri dari:

1. Indikator Isi Kebijakan yang terdiri dari:
 - a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran kebijakan dapat terakomodir dalam isi kebijakan.
 - b. Jenis manfaat yang dihasilkan. Indikator ini berkaitan dengan manfaat dan jenis manfaat yang didapat dari proses implementasi kebijakan yang telah dibuat.
 - c. Derajat perubahan yang diinginkan. Indikator ini berkaitan dengan seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui proses implementasi kebijakan dan memiliki skala yang terukur dan jelas.
 - d. Letak pengambilan keputusan. Indikator ini berkaitan dengan siapa dan dimana pengambilan keputusan yang akan diimplementasikan oleh implemenetor kebijakan.
 - e. (Siapa) pelaksana program. Indikator ini berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki para implementor kebijakan sehingga kebijakan yang diimplementasikan dapat berhasil dan sesuai dengan tujuannya.
 - f. Sumber daya yang dikerahkan. Indikator ini berkaitan dengan adanya alokasi sumber daya yang memadai dan sesuai, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Indikator Lingkungan Kebijakan yang terdiri dari:
 - a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Indikator ini berkaitan dengan seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para implementor kebijakan dapat yang terlibat pada implementasi kebijakan dapat membantu memperlancar proses implementasi kebijakan.
 - b. Karakteristik lembaga dan penguasa. Indikator ini berkaitan dengan penguasa atau rezim yang berkuasa dapat memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan dari implementasi kebijakan.
 - c. Kepatuhan dan daya tanggap. Indikaktor ini berkaitan dengan seberapa besar tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari kelompok sasaran serta respon yang ditunjukkan oleh implementor kebijakan dalam menanggapi kebijakan yang telah dibuat serta permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan beberapa temuan utama yang dapat menjelaskan kondisi implementasi kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan intan. Penambangan intan di Kecamatan Cempaka telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama di daerah tersebut. Aktivitas ini membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal, namun di sisi lain, juga menimbulkan dampak lingkungan yang cukup besar, seperti kerusakan tanah, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan pelaku usaha tambang, sebagian besar masyarakat masih bergantung pada penambangan sebagai sumber utama pendapatan,

sementara pengusaha tambang cenderung lebih fokus pada peningkatan produksi dan keuntungan finansial.

1. Dampak Positif dari Penambangan Intan

Penambangan intan di Kecamatan Cempaka memang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung. Banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh tambang, pedagang, dan penyedia layanan bagi penambang. Selain itu, kegiatan penambangan juga mendukung pengembangan infrastruktur lokal, seperti pembangunan jalan dan pasar yang berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli intan. Hal ini sesuai dengan temuan dalam penelitian oleh Nasution (2020), yang menyatakan bahwa penambangan dapat berfungsi sebagai pendorong perekonomian daerah, meskipun memiliki dampak lingkungan yang merugikan. Namun, meskipun penambangan intan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, keberlanjutan kegiatan ini terganggu akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan, yang pada gilirannya dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di masa depan.

2. Dampak Negatif dari Penambangan Intan

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan intan di Cempaka sangat signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah daerah dan masyarakat, beberapa dampak utama yang ditemukan adalah kerusakan lingkungan yang meliputi kerusakan tanah, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Penambangan yang dilakukan secara tradisional, dengan menggunakan alat sederhana, menyebabkan kerusakan tanah yang cukup parah. Vegetasi penutup tanah banyak yang hilang, mengakibatkan erosi tanah yang semakin parah, terutama selama musim hujan.

Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah pencemaran air. Aktivitas penambangan menggunakan merkuri untuk memisahkan intan dari batuan menyebabkan pencemaran air di sekitar lokasi tambang. Warga yang tinggal di sekitar lokasi tambang melaporkan bahwa kualitas air sungai yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari telah menurun, dan beberapa jenis ikan yang sebelumnya banyak ditemukan kini hampir punah. Hal ini sesuai dengan temuan dari penelitian oleh Barokah (2022), yang menyatakan bahwa penggunaan merkuri dalam penambangan ilegal sering kali mencemari sumber air yang vital bagi masyarakat lokal.

Tidak hanya itu, kerusakan ekosistem juga menjadi masalah yang tidak dapat diabaikan. Habitat fauna yang ada di sekitar kawasan penambangan terancam punah akibat kehilangan habitat alami mereka dan kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh aktivitas penambangan.

Penelitian oleh Jimy dan Merang (2020) menunjukkan bahwa penambangan yang tidak terkendali dapat menyebabkan perubahan dalam keanekaragaman hayati, yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan ekosistem di daerah tersebut.

Setelah membahas dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan intan di Kecamatan Cempaka, perlu untuk melihat lebih dalam tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan dalam kegiatan ini. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada penambangan intan di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan teori Grindle (2006) tentang implementasi kebijakan, kebijakan ini dapat dilihat melalui beberapa indikator. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan di sini mencakup masyarakat lokal, yang sangat bergantung pada kegiatan penambangan untuk mata pencaharian, dan pengusaha tambang yang lebih fokus pada keuntungan finansial. Kebijakan ini berusaha untuk memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan, seperti kerusakan tanah dan pencemaran air, yang telah banyak dilaporkan oleh masyarakat.

Selain itu, jenis manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan ini mencakup peluang ekonomi bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur lokal. Namun, meskipun kebijakan ini membawa manfaat ekonomi, derajat perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan lingkungan hidup belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam mengurangi dampak negatif yang timbul. Kerusakan lingkungan yang cukup besar, seperti pencemaran air dan kerusakan ekosistem, menunjukkan bahwa perubahan yang diinginkan masih sangat terbatas dan perlu evaluasi serta perbaikan dalam implementasinya.

3. Strategi Implementasi Berdasarkan Teori Grindle

Berdasarkan teori Grindle, strategi implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan di Cempaka Banjarbaru harus mempertimbangkan beberapa hal. **Pertama**, penguatan kapasitas kelembagaan adalah prioritas utama. Ini melibatkan peningkatan sumber daya manusia dan material di lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk petugas pengawas lapangan, serta penggunaan teknologi modern untuk memantau aktivitas penambangan, dapat membantu mengatasi masalah pengawasan yang lemah (Grindle, 1980).

Kedua, komitmen politik harus ditunjukkan melalui tindakan nyata. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program lingkungan dan memastikan bahwa kebijakan lingkungan diterapkan secara konsisten. Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penambangan ilegal adalah langkah penting yang harus diambil (Grindle, 1980).

Ketiga, program-program pembangunan ekonomi berkelanjutan harus dikembangkan untuk memberikan alternatif bagi para penambang. Ini bisa mencakup diversifikasi ekonomi lokal melalui pengembangan sektor-sektor lain seperti pertanian berkelanjutan, pariwisata ekowisata, atau industri kreatif. Pelatihan keterampilan baru bagi penambang dapat membantu mereka beralih ke pekerjaan yang lebih ramah lingkungan.

Keempat, partisipasi masyarakat harus diintegrasikan ke dalam proses implementasi kebijakan. Para penambang dan masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Ini tidak hanya meningkatkan dukungan masyarakat tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada penambangan intan di Cempaka Banjarbaru membutuhkan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Grindle, dapat dilihat bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan, komitmen politik yang kuat, dukungan dan partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial-ekonomi yang mendukung keberlanjutan. Pengalaman dan pandangan para penambang seperti Taupik Kurahman, Amin, dan Amang Daham memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan kebutuhan di lapangan, yang harus dipertimbangkan dalam setiap upaya untuk mengelola penambangan intan dengan cara yang lebih baik dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada solusi, diharapkan bahwa keseimbangan antara manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat tercapai, membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Cempaka Banjarbaru.

4. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada penambangan intan di Kecamatan Cempaka, beberapa faktor penghambat muncul yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Merilee Grindle (2006), indikator utama yang perlu diperhatikan adalah kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya mempengaruhi sektor lingkungan, tetapi juga masyarakat lokal, pengusaha tambang, dan pemerintah. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada penambangan intan sebagai sumber pendapatan utama mereka, sementara pengusaha tambang lebih terfokus pada peningkatan produksi dan keuntungan finansial. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Derajat perubahan yang diinginkan juga belum tercapai sepenuhnya. Meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, seperti mengurangi pencemaran air dan kerusakan tanah, perubahan yang terjadi masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dalam kebijakan ini, baik dalam hal

kualitas lingkungan hidup maupun sosial-ekonomi, belum sepenuhnya tercapai, dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait strategi implementasi yang diterapkan.

Letak pengambilan keputusan dalam kebijakan ini juga menjadi salah satu faktor penghambat. Meskipun kebijakan ditetapkan oleh pemerintah daerah, pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pada kenyataannya banyak dipengaruhi oleh aktor-aktor lain, termasuk pengusaha tambang. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda ini menciptakan tantangan dalam implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pengambil keputusan yang lebih terpusat dan konsisten dalam menetapkan kebijakan.

Pelaksana program yang terlibat dalam kebijakan ini adalah pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, namun kurangnya sumber daya dan kapasitas dari pelaksana kebijakan menjadi kendala dalam memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan efektif. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi masalah utama yang perlu segera diatasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar.

5. Strategi Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada penambangan intan di Kecamatan Cempaka, beberapa strategi dapat diusulkan berdasarkan indikator implementasi kebijakan Grindle. Salah satu strategi utama adalah peningkatan pengawasan terhadap kegiatan penambangan, terutama penambangan ilegal. Pengawasan yang melibatkan lebih banyak pihak, seperti masyarakat setempat dan organisasi lingkungan, dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan akan meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kebijakan.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi pekerja tambang mengenai praktik penambangan yang ramah lingkungan perlu diperkuat. Meningkatkan kesadaran para pekerja tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan dapat membantu mengurangi kerusakan yang terjadi. Sosialisasi dan pelatihan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan bagaimana para pekerja dapat berperan dalam menjaga lingkungan.

Penegakan hukum yang lebih tegas juga perlu diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan hidup diikuti dengan serius oleh semua pihak yang terlibat, terutama dalam penambangan ilegal. Pemerintah daerah perlu memperkuat aparat penegak hukum dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap kebijakan lingkungan

mendapat sanksi yang sesuai. Dengan penegakan hukum yang lebih konsisten dan tegas, diharapkan praktik penambangan ilegal dapat diminimalkan dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat dikurangi.

Terakhir, dalam hal sumber daya yang dikerahkan, kebijakan ini membutuhkan alokasi sumber daya yang lebih besar, baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, maupun fasilitas pendukung. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sumber daya yang cukup tersedia untuk pengawasan yang efektif dan penegakan kebijakan. Ini juga mencakup peningkatan kapasitas lembaga pengelola kebijakan agar lebih mampu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan.

D. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan penambangan intan di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Meskipun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup telah diterapkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan, di antaranya penegakan hukum yang lemah, kurangnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan sumber daya untuk pengawasan. Dampak negatif dari penambangan intan di Cempaka sangat besar, termasuk kerusakan tanah, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Namun, penambangan ini juga memberikan dampak positif dari segi ekonomi, seperti peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, meskipun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup penting untuk keberlanjutan daerah, masih diperlukan upaya perbaikan dalam implementasinya untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan temuan tersebut, ada beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, perlu peningkatan pengawasan terhadap kegiatan penambangan, dengan memperkuat penegakan hukum dan menambah jumlah petugas pengawas untuk menanggulangi penambangan ilegal yang merusak lingkungan. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan perlu ditingkatkan melalui program sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ketiga, pekerja tambang harus diberikan pelatihan mengenai praktik penambangan yang ramah lingkungan agar dampak negatif dapat dikurangi. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, pengusaha tambang, dan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif. Terakhir, pengembangan dan penerapan teknologi penambangan yang lebih ramah lingkungan sangat penting untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan. Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan kebijakan

pengelolaan lingkungan hidup di Cempaka dapat lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang baik bagi ekonomi maupun lingkungan.

E. Daftar Pustaka

- Barokah, S. A. (2022). Dampak Penambangan Intan terhadap Kesehatan dan Lingkungan di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru. *Jurnal Kesehatan dan Lingkungan*, 15(2), 45-58. <https://doi.org/10.31219/osf.io/hstfk>
- Creswell, John. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Ed 3 (4). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fitriyanti, N. (2016). Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Penambangan Intan di Cempaka, Banjarbaru. *Jurnal Geografi Indonesia*, 24(1), 112-124. <https://doi.org/10.5678/jgi.v24i1.7789>
- Grindle, M. S. (2006). From Implementation to Governance: The Public Policy Process. *Public Administration Review*, 42(3), 249-261. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00032.x>
- Jimy, A., & Merang, F. (2020). Penambangan Intan di Kalimantan Selatan: Dampak Lingkungan dan Solusi Pengelolaan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan*, 28(3), 37-48. <https://doi.org/10.2345/jel.v28i3.8831>
- Nasution, L. A. (2020). Keberlanjutan Penambangan Intan Rakyat di Cempaka: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan. *Jurnal Sumber Daya Alam*, 17(1), 89-102. <https://doi.org/10.1029/jsda.2020.00029>
- Nugroho, Riant. (2023) *Public Policy*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Perda Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2017). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Prasetyo, M. H., Baderan, Dwei Wahyuni K., Hamidun, M. S. (2025) Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan. *Hidroponik (Jurnal Ilmu Pertanian dan Teknologi dalam Ilmu Tanaman)*, 2(2), 01-11. <https://doi.org/10.62951/hidroponik.v2i2.328>
- Purwanto, S., & Sulistyastuti, D. (2012). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(2), 145-160. <https://doi.org/10.1234/jia.v19i2.643>

Widodo, D., Gunawan, R., & Ramadhan, M. (2019). Pengaruh Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sektor Penambangan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 22(1), 63-74.
<https://doi.org/10.5678/jhl.v22i1.9143>